

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA  
KECAMATAN SEBULU  
TAHUN 2024



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LKjIP)**

Alamat : Jalan. Pemuda No. 54 Sebulu Ilir  
Email [sebulu@mail.kukarkab.go.id](mailto:sebulu@mail.kukarkab.go.id)  
Website : [sebulu.kukarkab.go.id](http://sebulu.kukarkab.go.id) Kode Pos 75552





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Sebulu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Sebulu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebulu Tahun 2021 s/d 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Sebulu Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Sebulu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sebulu, 13 Februari 2025

Camat Sebulu



## DAFTAR ISI

### Contents

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
<b>1.2 Dasar Hukum .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....</b>	<b>2</b>
a. Tugas Pokok Kecamatan.....	2
b. Fungsi Kecamatan.....	2
<b>1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....</b>	<b>12</b>
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
1.5 Sumber Daya Manusia .....	13
1.6 Uraian Singkat Organisasi .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	17
2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	17
<b>2.1.3 Strategi.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.4 Arah Kebijakan.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.5 Program.....</b>	<b>20</b>
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>35</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	35
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	36
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	52
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023.....	64
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	70
3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	70
3.1.5. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	72
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	75
<b>BAB IV.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1 Kesimpulan .....	89
4.2 Perbaikan Kedepan .....	89

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>
<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>90</b>
<b>KONDISI GEOGRAFIS .....</b>	<b>101</b>
<b>1. Hari Jadi Kecamatan Sebulu.....</b>	<b>101</b>
<b>2. Titik Koordinat Kecamatan Sebulu.....</b>	<b>102</b>
<b>a. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sebulu .....</b>	<b>102</b>
<b>b. Topografi dan Curah Hujan Kecamatan Sebulu .....</b>	<b>102</b>
<b>d. JARAK DARI DESA KE KECAMATAN, KABUPATEN, PROPINSI     (ORBITASI) .....</b>	<b>103</b>
<b>Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sebulu .....</b>	<b>104</b>
<b>CAPAIAN KINERJA PELAYANAN (PATEN) KECAMATAN SEBULU TAHUN 2024 .....</b>	<b>110</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan dan saling terkait antara tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

### a. Tugas Pokok Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebutkan :

***Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.***

### b. Fungsi Kecamatan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Sebulu Tahun 2024***

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraab kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

#### **CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :**

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan;
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, PEMBERDAYAAN masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### **SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :**

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
8. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM),

- pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa;
  11. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
  12. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah:**

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem

- 'penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
  7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  9. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### **Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)

6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

### **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;

11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

### **Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

**Masyarakat** Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Tramtib) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan;
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi;
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu sertamembahayakan lingkungan hidup;

10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

### **Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa**

Seksi pemerdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan,
4. perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum; 10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian

Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayan Masyarakat Desa;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
13. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup

- beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
  12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
  13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
  14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

### **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;

11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ( PD ) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

##### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya aparatur Kecamatan dan Desa belum sesuai dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Belum Optimalnya penggunaan Teknologi, peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif.

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
6. Masih Kurangnya Anggaran Rutin di Kecamatan dan Desa sehingga kurang maksimalnya kegiatan yang dilakukan.
7. Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Sebulu Perlunya Pembinaan, Koordinasi serta anggaran yang Maksimal.
8. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sebulu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
  - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
  - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.
  - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
  - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
  - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
  - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.

### **1.5 Sumber Daya Manusia**

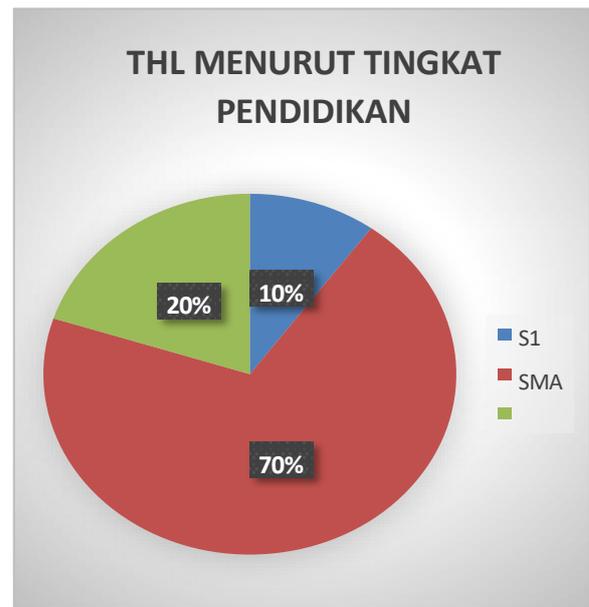
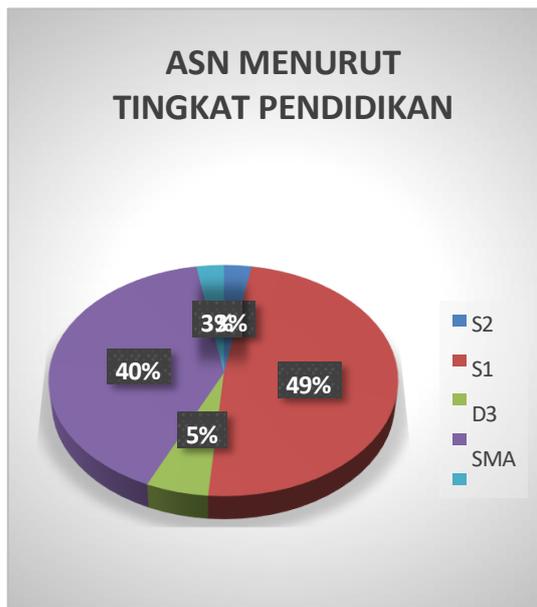
Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumber daya manusia khususnya ASN Kantor Camat Sebulu melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain.

Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensipotensi yang ada di lingkungan Kecamatan .

Tabel : Pegawai Kantor Camat Sebulu berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Diploma	SMA	SMP	Jumlah
1	Camat	1					1
2	Sekretaris Camat		1				1
3	Bagian Umum Tatalaksana dan Kepegawaian		3	1	3		7
4	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan		2		2		4
5	Seksi Pemerintahan		3		3		6
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		1	1	1		3
7	Seksi Kesejahteraan Sosial				3	1	4
8	Seksi Pelayanan Umum		2		2	1	5
9	Seksi Ketentraman dan Ketertiban		3		2		5
11	THL		1		8	1	10
	Jumlah	1	15	2	27	3	46

Grafik Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:



Adapun jumlah keseluruhan Sumber Daya manusia/ ASN Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai akhir tahun tanggal 31 Desember 2024 adalah berjumlah 36 orang, Honor Lokal ( THL ) 10 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Sebulu Tahun 2024**

**Tabel ; Jumlah Pegawai Kantor Camat Sebulu Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Golongan II				Golongan III				Golongan IV				THL	Jumlah (Orang)		Total	Keterangan
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		L	P		
1	Camat									1					1		1	
2	Sekretaris Camat								1						1		1	
3	Bagian Umum Tatalaksana dan Kepegawaian				4	1			2					5	9	3	12	
4	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan				1	2			1					1	1	4	5	
5	Seksi Pemerintahan		1	1	1	2			1					2	6	2	8	
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa				2	1		1						1	4	1	5	
7	Seksi Kesejahteraan Sosial			1	3										3	1	4	
8	Seksi Pelayanan Umum		1	1	1			1	1						4	1	5	
9	Seksi Ketentraman dan Ketertiban			1	3		1		1					1	5	2	7	
	<b>Jumlah/Total</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>				<b>10</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	

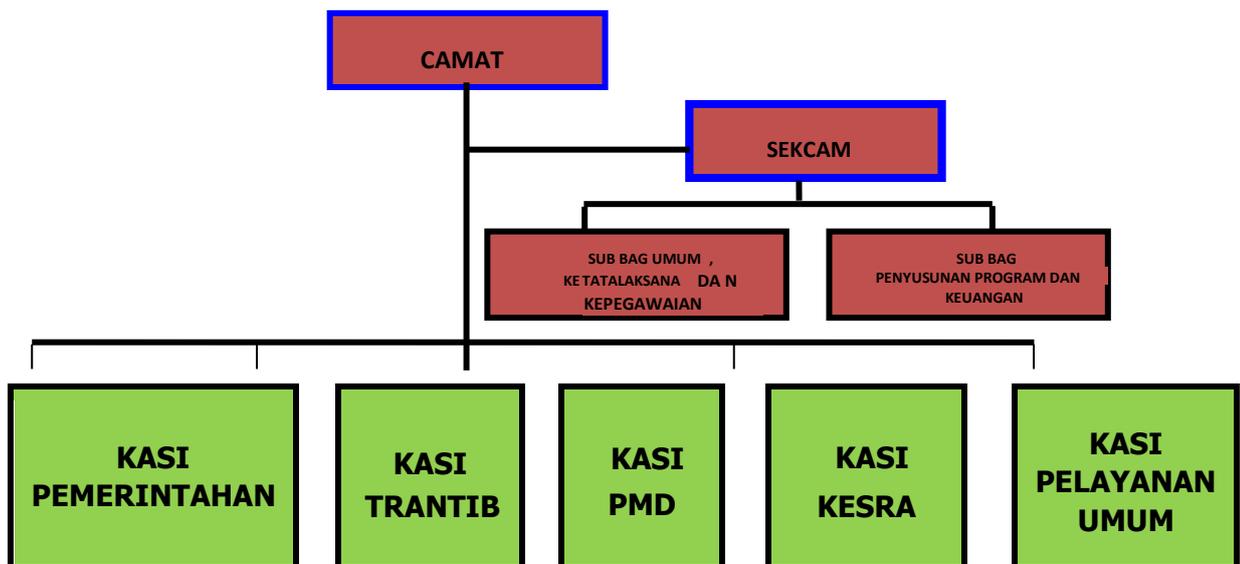
### 1.6 Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, membawahkan :
  - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum;

Gambaran tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Sebulu



Tugas pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh suatu organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

#### 2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebulu adalah Misi ke- 1 yaitu. **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani**. Kemudian

merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1. Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti 2. Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

### 2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Kecamatan Sebulu untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan

### 2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		3	Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		4	Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		5	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

### 2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
<b>Meningkatkan Kualitas Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)***  
***Kecamatan Sebulu Tahun 2024***

*outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	37	Jumlah Keluhan Masyarakat yang diselesaikan oleh Kecamatan dibagi jumlah total keluhan masyarakat yang disampaikan ke kecamatan dikali 100
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	63	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus trantibun di Kecamatan
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	40	Nilai Total PADes tahun berjalan (N) dikurang nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dibagi Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1) dikali 100
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun
		Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 31 Maret setiap tahun	Persen	100	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling	Persen	100	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
	Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	lambat akhir bulan Februari setiap tahun			lambat akhir bulan Februari setiap tahun
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun
5	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan RKBMD 100% sesuai dengan BMD yang akan diadakan
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan SHS Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya Untuk anggaran perubahan paling lambat bulan agustus tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian LKjIP Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian IKK LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni setiap tahun Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester II akhir bulan oktober setiap tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan ForumKonsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
14	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak Indikator Penilaian:- Menyusun Roadmap dan Rencana Aksi Agenda Perubahan: Poin 40;- Melakukan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK(Laporan Pelaksanaan Sosialisasi): Poin 30- Membacakan Core Values ASN BerAKHLAK pada kegiatan Apel Pagi, Rapat, Koordinasi/Pertemuan, dan/atau Sosialisasi (Video kegiatan): Poin 10- Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di Media Sosial, poster, x-banner, dan media lainnya(Foto/Screenshot): Poin 10- Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Tagar Bangga Melayani Bangsa dalam Naskah Surat Dinas, Poster, Latar Virtual, dan Bahan Paparan (Foto/Screenshot): Poin 10.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada PD per Triwulan Laporan Pengelolaan Risiko (pelaksanaan RTP) Triwulan 1 (30 April) Triwulan 2 (31 Juli) Triwulan 3 (31 Oktober) Triwulan 4 (31 Januari) Tahunan (10 Januari) tahun berikutnya 100 Inspektorat Daerah
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	Nilai SAKIP PD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	Juara Inovasi Tk. Nasional 200 Nominasi Tk. Nasional 160 Juara Inovasi Tk. Provinsi 140 Nominasi Tk. Provinsi 120 Juara Inovasi Tk. Kabupaten 130 Nominasi Tk. Kabupaten 110 Peserta Lomba Inovasi Tk. Kabupaten 100 Tidak Mengikuti Lomba Inovasi -20
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	Pengamanan Aset Tanah Penilaian Tingkat Pengamanan Aset Tanah yang tercatat dalam KIP Perangkat Daerah :a. Pensertifikatan Tanah: 100b. Pemagaran asset tanah: 75c. Pemasangan Patok batas dan Plang Nama: 50
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada OPD (Laptop, Kendaraan Dinas, dll)
25	Terlaksananya Program pengentasan	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	Memiliki program pengentasan kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
	Kemiskinan pada Perangkat Daerah				
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	14	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	Capaian LPPD
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	0 % s.d 100%
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	0 % s.d 100%
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	Indeks Inovasi Daerah dibanding dengan target RPJMD
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	Nilai Indeks Pelayanan Publik Pemda dibanding dengan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan (OMBUDSMAN)
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	Hasil berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi <a href="https://ppkl.menlhk.go.id/lklh">https://ppkl.menlhk.go.id/lklh</a> sesuai dengan target RPJMD
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah

Tabel

**Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	37	40
2	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	NA	63	65
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	NA	40	45
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	NA	100	NA
5	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 31 Maret setiap tahun	Persen	NA	100	NA
	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	NA	100	NA
6	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	NA	100	NA
	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	NA	100	NA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
7	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	NA	100	NA
8	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	NA	100	NA
9	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	NA	100	NA
10	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	NA	100	NA
11	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	NA	100	NA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	NA	100	NA
12	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	NA	100	NA
13	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	NA	100	NA
14	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	NA	100	NA
15	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	NA	100	NA
16	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	NA	100	NA
17	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	NA	100	NA
18	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	NA	100	NA
19	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	NA	100	NA
20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	NA	100	NA
21	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	NA	100	NA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	NA	100	NA
23	Pengamanan Aset Tanah	Persen	NA	75	NA
24	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	NA	100	NA
25	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	NA	1	NA
26	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	NA	14	NA
27	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	NA	100	NA
28	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	NA	100	NA
29	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	NA	14	NA
30	Nilai LPPD	Nilai	NA	3,6	NA
31	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	NA	73	NA
32	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	NA	64	NA
33	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	NA	49,57	NA
34	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	NA	8,95	NA
35	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	NA	Zona Hijau	NA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2024	Target Akhir Renstra PD
36	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	NA	100	NA
37	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	NA	100	NA
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	NA	100	NA
39	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	NA	100	NA
40	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	NA	1	NA
41	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	NA	1	NA

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

#### 3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sebulu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

##### a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

##### b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja keseluruhan Kecamatan Sebulu tahun 2024 sebesar 97.91%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	37	100	270.27	Sangat Tinggi
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	63	100	158.73	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	40	41	102.50	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**  
**Kecamatan Sebulu Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Real isasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilai an
	Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	31 31 Maret setiap tahun					
<b>3</b>	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
<b>4</b>	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
<b>5</b>	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
<b>6</b>	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	142.86	Sangat Tinggi
<b>7</b>	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	50	50.00	Rendah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Real isasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilai an
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	75	75.00	Sedang
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	90	90.00	Tinggi
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
14	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	72.98	72.98	Tinggi
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	59.00	78.67	Tinggi
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	0	0.00	Sangat Rendah
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	14	100.00	Sangat Tinggi
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	14	14	100.00	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.6	3.6	100.00	Sangat Tinggi
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	73	100.00	Sangat Tinggi
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	64	100.00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49.59	49.59	100.00	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8.95	8.95	100.00	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	85	85	100.00	Sangat Tinggi
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Sangat Tinggi
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100.00	Sangat Tinggi
<b>RATA - RATA</b>				<b>3430</b>	<b>3358</b>	<b>97.91</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja ke-1** (Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di Tindak Lanjuti) Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2024 sebesar 37% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 270.27%. Capaian Kinerja 270.27% karena keluhan masyarakat dapat ditangani dan diberikan arahan sebagaimana mestinya, diharapkan bagian pelayanan Umum lebih meningkatkan pelayanan agar keadaan ini bisa dipertahankan untuk pelayanan yang lebih baik. Rekapitulasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Desa	Bulan												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Giri Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sumber Sari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Manunggal Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	ditindaklanjuti dan ditangani
4	Mekar Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Segihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Sebulu Ilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sebulu Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sebulu Modern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Beloro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tanjung Harapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Sanggulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Selerong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Senoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Lekaq Kidau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Jumlah Keluhan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>												

**Indikator Kinerja ke-1** (Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum) Target Kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2024 sebesar 63% dan Realisasi 100% atau Capaian Kinerja sebesar 158.73%. Target Kinerja tercapai karena tidak ada kejadian ketentraman dan ketertiban yang menimbulkan

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Sebulu Tahun 2024*

masalah besar dan kejadian ketentraman dan ketertiban bisa ditangani oleh bagian Ketentraman dan Ketertiban. Table presentase capaian kinerja ketentraman dan ketertiban sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Ditangani	Keterangan
1	Giri Agung			
2	Sumber Sari	1	1	Bencana Kebakaran
3	Manunggal Daya			
4	Mekar Jaya	1	1	Penanganan dan pendampingan Penjemputan
5	Segihan			
6	Sebulu Ilir			
7	Sebulu Ulu	1	1	Kasus Keracunan Masal
8	Sebulu Modern	1	1	Bencana Kebakaran
9	Beloro			
10	Tanjung Harapan			
11	Sanggulan			
12	Selerong	2	2	Bencana Kebakaran dan anak Tenggelam
13	Senoni			
14	Lekaq Kidau			
	Jumlah Kasus	6	6	
	<b>PERSENTASE CAPAIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus trantibun di Kecamatan</b>

**Indikator Kinerja ke-1** (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan) Target Kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2024 sebesar 40% dan Realisasi 41% atau capaian kinerja sebesar 102.50%, capaian kinerja 102.50% karena realisasi melebihi target.

NO	Nama Desa	PA Desa 2022	PA Desa 2023	PA Desa 2024	Presentase (%)
1	BELORO		Rp 1,800,000		-100.00
2	GIRI AGUNG		Rp 4,500,000	Rp 11,009,372	144.65
3	LEKAQ KIDAU				
4	MANUNGGAL DAYA		Rp -	Rp 4,000,000	
5	MEKAR JAYA				
6	SANGGULAN				
7	SEBULU ILIR				
8	SEBULU MODEREN				
9	SEBULU ULU				
10	SEGIHAN		Rp 6,273,000	Rp 2,749,500	-56.17
11	SELERONG				
12	SENONI				
13	SUMBER SARI				
14	TANJUNG HARAPAN				
Presentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa =(Nilai Total PADes tahun berjalan (N) dikurang nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1)) dibagi Nilai Total PADes tahun seblumnya (N-1) dikali 100		Rp -	Rp 12,573,000	Rp 17,758,872	41.25



- 2) Indikator Kinerja ke-2** (Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun 100% per 31 Maret setiap tahun). Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2024 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena sesuai rekafitulasi bagian umum tatalaksana dan kepegawaian seluruh ASN melaporkan LHKPN.
- Indikator Kinerja ke-2** (Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun 100% per 31 Maret setiap tahun). Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2024 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena sesuai rekafitulasi bagian umum tatalaksana dan kepegawaian seluruh ASN melaporkan LHKPN.
- 3) Indikator Kinerja ke-3** (Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun) target kinerja "Indikator Kinerja ke - 3 Tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena sesuai rekafitulasi bagian umum tatalaksana dan kepegawaian seluruh ASN Kepatuhan Penyampaian SKP sebelum akhir bulan Februari setiap Tahun.
- 4) Indikator Kinerja ke-4** (Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun)  
Target kinerja "Indikator Kinerja ke-4" tahun 2024 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Kepatuhan Input SIRUP dilakukan setelah terbitnya DPA SKPD pada bulan Januari dan dilakukan input SIRUP sebelum akhir bulan Februari.
- 5) Indikator Kinerja ke-5** (Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-5" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% atau Capaian Kinerja 100% , Target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat Tinggi. PIC e Pantau selalu mengingatkan Input pelaporan e Pantau dan verifikasi diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya
- 6) Indikator Kinerja ke-6** (Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-6" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% atau Capaian Kinerja 100% , Target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat Tinggi.

- 7) Indikator Kinerja ke-7** (Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-7" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 50% Capaian Kinerja 50%. Kriteria Penilaian Rendah, factor pendukung yaitu Melakukan Rapat Koordinasi Usulan dengan Pihak Terkait dan Regulasi yang tepat sedangkan factor penghambat yaitu Kurangnya SDM yang menangani.
- 8) Indikator Kinerja ke-8** (Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun)  
Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-8" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 75% dengan capaian kinerja 75 % target kinerja tidak tercapai dengan kriteria penilaian sedang, karena penyampaian laporan LKjIP lewat dari akhir bulan februari. Adapun faktor pendukung penyampaian laporan LKjIP ada lapoaran Keuangan dan laporan Kinerja sedangkan faktor penghambat yaitu Lambatnya data yang diberikan oleh bidang dan masih kurangnya SDM yang menangani.
- 9) Indikator Kinerja ke-9** (Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun)  
Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-9" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% capaian kinerja 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Laporan Keuangan SKPD disampaikan sebelum tanggal 24 Januari.
- 10) Indikator Kinerja ke-10** (Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun)  
Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-10" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 90% capaian kinerja 90% dengan kriteria penilaian tinggi. Faktor Pendukung yaitu Aplikasi Pendukung sehingga mempermudah penarikan data responden dan pengolahan Data, Templet Laporan SKM sudah tersedia di Aplikasi, Proses penyampamaan laporan sudah tersedia di menu Aplod laporan pada Aplikasi SKM Adapun faktor penghambat yaitu Perlunya Pendamping dalam tata cara penyusunan laporan SKM, Perlunya Pendamping Tata Cara Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Perlunya Evaluasi Pembahasan terkait Pembuatan Laporan SKM dan LTR semester satu dan dua.

- 11) Indikator Kinerja ke-11** (Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-11" tahun 2024 sebesar 100%, dengan Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 12) Indikator Kinerja ke-12** (Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-12" tahun 2024 sebesar 100%, dengan Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Segera Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 13) Indikator Kinerja ke-13** (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-12" tahun 2024 sebesar 100%, dengan Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor pendukung yaitu matrix MR, Realisasi Keuangan, Rapat Koordinasi antar Pimpinan dan seluruh Bidang
- 14) Indikator Kinerja ke-14** (Internalisasi Core Values ASN Berakhlak ) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-14" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak melalui Pemasangan pamphlet, pembacaan Core Values ASN Berakhlak Ketika apel setiap hari senin dan dibacakan Ketika ada acara sosialisasi dan diharapkan lebih meningkatkan Kerjasama dan koordinasi
- 15) Indikator Kinerja ke-15** (Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-15" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana dibuat setelah APBD ditetapkan.
- 16) Indikator Kinerja ke-16** (Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-16" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 17) Indikator Kinerja ke-17** (Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-17" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerrja 100%. Kriteria Penilaian Sangat Tinggi karena semua seksi membuat dokumen Manajemen Risiko PD per

triwulan, dokumen Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko tersampaikan dan diterima inspektorat.

- 18) Indikator Kinerja ke-18** (Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah)  
Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-18" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%. Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 19) Indikator Kinerja ke-19** (Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja ke - 19 Tahun 2024 sebesar 100 Realisasi 72.98 Capaian Kinerja 72.98 (Berdasarkan Pengumuman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-2/P3A.DIARPUS/000.5.15.1/12/2024 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024) Capaian Kinerja Tinggi, diharapkan lebih meningkatkan Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah dan melakukan koordinasi ke Kabupaten apabila ada hal yang perlu dikoordinasikan.
- 20) Indikator Kinerja ke-20** (Nilai SAKIP Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja ke - 20 Tahun 2024 sebesar 100 Realisasi 64.64 Capaian Kinerja 64.64 Capaian Kinerja Rendah, Ada beberapa catatan pada LHE SAKIP, melakukan reviu dan Tindak lanjut atas LHE SAKIP Terserbut dengan meningkatkan koordinasi dan kinerja untuk perbaikan peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- 21) Indikator Kinerja ke-21** (Prestasi Inovasi Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-21" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, Perangkat daerah sudah menyampaikan inovasi diharapkan kedepannya inovasi lebih baik lagi.
- 22) Indikator Kinerja ke-22** (Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-22" tahun 2024 sebesar 100% dengan Realisasi 100 Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, segera melakukan Tindak lanjut pengaduan SP4N Laporan dan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi
- 23) Indikator Kinerja ke-23** (Pengamanan Aset Tanah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-23" tahun 2024 sebesar 75%, Realisasi 59% Capaian Kinerja 78.67 %, dengan Kriteria Penilaian Tinggi, Adanya pemasangan plang untuk pengamanan Aset Tanah.
- 24) Indikator Kinerja ke-24** (Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-24" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi,

Pengurus barang membuat fakta integritas Pemakai Aset BMD yang Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah, diharapkan lebih meningkatkan Kerjasama dan koordinasi.

- 25) Indikator Kinerja ke-25** (Jumlah program pengentasan kemiskinan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-25" tahun 2024 sebesar 1 jumlah realisasi 0 capaian Kinerja 0 dengan Kriteria Penilaian Sangat rendah, tidak adanya program pengentasan kemiskinan pada perangkat daerah melakukan koordinasi untuk penganggarannya.
- 26) Indikator Kinerja ke-26** (Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-26" tahun 2024 sebesar 14 Persen Realisasi 14 Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian sangat tinggi, adanya dukungan pelaksanaan program PMD dari kabupaten.
- 27) Indikator Kinerja ke-27** (Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-27" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, diharapkan lebih meningkatkan Kerjasama dan koordinasi.
- 28) Indikator Kinerja ke-28** (Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-28" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 29) Indikator Kinerja ke-29** (Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-29" tahun 2024 sebesar 14% Realisasi 14% Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, diharapkan lebih meningkatkan Kinerja untuk Kepatuhan Pelaporan P3DN.
- 30) Indikator Kinerja ke-30** (Nilai LPPD) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-30" tahun 2024 sebesar 3.6 Nilai Realisasi 3.6 Nilai Capaian Kinerja 100 Nilai, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 31) Indikator Kinerja ke-31** (Nilai SAKIP Pemerintah Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-31" tahun 2024 sebesar 73 Nilai Realisasi 64.643 Nilai Capaian Kinerja 88.55 Nilai, dengan Kriteria PenilaianTinggi.
- 32) Indikator Kinerja ke-32** (Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-32" tahun 2024 sebesar 64 Nilai Realisasi 64 Nilai Capaian Kinerja 100 Nilai, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja Faktor Penghambat Kurangnya sosialisasi.

**33) Indikator Kinerja ke-33** (Indeks Inovasi Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-33" tahun 2024 sebesar 49.59 Nilai Realisasi 49.59 Nilai Capaian Kinerja 100 Nilai dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.

**34) Indikator Kinerja ke-34** (Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-34" tahun 2024 sebesar 8.95 Nilai Realisasi 8.95 Nilai Capaian Kinerja 100 Nilai, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, Adanya Kesesuaian dengan Standar Pelayanan, Penilaian melihat apakah layanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Adanya Respon terhadap Keluhan, Mengukur bagaimana instansi merespon keluhan atau pengaduan dari Masyarakat, Mengintruksikan Kepada Pimpinan Unit Penyelenggara pelayanan Publik dan seluruh Penyelenggara pelayanan Publik tersebut agar melanjutkan dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan Prima. Faktor Penghambat perlu mempertahankan kinerja dari atribut kompetensi petugas melalui beberapa hal seperti memberikan berbagai pelatihan baik hard skills maupun soft skills yang mampu meningkatkan kemampuan petugas, pengetahuan petugas, keterampilan petugas serta pengalaman petugas untuk memberikan layanan yang terjamin sesuai standar operasional yang ada, Perlunya evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan, Perlunya sarana, prasarana, dan fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan, Perlunya memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.

**35) Indikator Kinerja ke-35** (Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-35" tahun 2024 sebesar 85 Predikat Realisasi 85 Predikat Capaian Kinerja 100 Predikat, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, Faktor Pendukung Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Menilai sejauh mana instansi atau lembaga mematuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, termasuk ketersediaan informasi, waktu pelayanan, dan prosedur yang jelas, Transparansi, mengevaluasi keterbukaan instansi dalam memberikan informasi kepada publik, termasuk informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu yang

dibutuhkan untuk mendapatkan layanan, Akuntabilitas : Menilai tanggung jawab instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik, termasuk bagaimana mereka menanggapi keluhan dan pengaduan dari Masyarakat, Kualitas Pelayanan : Mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan, termasuk sikap dan perilaku petugas, kemudahan akses, dan kepuasan pengguna layanan, Pengelolaan Pengaduan : Menilai efektivitas sistem pengelolaan pengaduan yang ada di instansi tersebut, termasuk cara menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Masyarakat, Inovasi dalam Pelayanan: Mengevaluasi upaya inovatif yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. diharapkan seluruh ASN yang merokok untuk mengaktifkan ruang merokok dan tidak merokok sembarangan, Faktor Penghambat yaitu Perlunya Fasilitas Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas, Belum adanya meja dan Loker Pelayanan Standar Pelayanan, Perlunya sarana Tempat Bermain Anak, ,belum adanya Ruang Kusus ibu Menyusui, belum adanya Toilet Khusus bagi warga penyandang Disabilitas.

**36) Indikator Kinerja ke-36** (Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-33" tahun 2024 sebesar 100 Realisasi 100 % Nilai Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Sosialisasi melalui tulisan dilarang merokok/vape yang terpampang di setiap ruangan.

**37) Indikator Kinerja ke-37** (IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-37" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100 % Nilai Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung yaitu Kemudahan persyaratan, Prosedur pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keseuaian Pelayanan, Komentasi Petugas, Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Kualitas Sarana dan Prasarana. Faktor Penghambat Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengisi IKM secara Digital, Kurangnya Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public, Kurangnya Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Kurangnya pemahaman tentang IKM Secara Digital sehingga masyarakat mengabaikan pengisian IKM

**38) Indikator Kinerja ke-38** (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-38" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100 % Nilai Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung adanya Petugas Pengelola Sampah Rumah Tagga, ada Petugas Kebersihan Lingkungan, adanya Fasilitas TPS di beberapa Desa yang di distribusikan Pemerintah Kecamatan.,

Adanya Kendaraan Truck Pengangkut Sampah Masyarakat, Faktor Penghambat yaitu Perlunya Memperbanyak Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Belum Danya Tempat Pembuangan Ahir (TPA), Kurangnya kesadarn Masyarakat dalam memilah sampah kering, Basah dan lain lain, Perlunya TPS 3R terkait pengolahan sampah rumah tangga.

**39) Indikator Kinerja ke-39** (Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-38" tahun 2024 sebesar 100% Realisasi 100 % Nilai Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung Dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD, Pelaporan e Pantau setiap Bulan dan Laporan Statistik Realisasi Serapan Anggaran pada SIPD, Faktor Penghambat yaitu Kurangnya pemahaman setiap seksi dalam pencapaian target kinerja, akan dikoordinasikan dan melakukan rapat kerja yang lebih intensif

**40) Indikator Kinerja ke-40** ( Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-40" tahun 2024 sebesar 1 Laporan Realisasi 1 Laporan Capaian Kinerja 100 Laporan dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Kecamatan Sebulu telah melakukan pemetaan mengaji dan membuat laporan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah

**41) Indikator Kinerja ke-41** (SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah) Target Kinerja "Indikator Kinerja Ke-41" tahun 2024 sebesar 1 Surat Keputusan Realisasi 1 Surat Keputusan Nilai Capaian Kinerja 100% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 011/BAZNAs-KUKAR/I/II/2024 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2024 – 2029 ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 26 Februari 2024.

### **3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Persentase realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 98.15%, sedangkan persentase realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 106.37%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 8.22%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.2

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	35	35	100.00	37	100	270.27	Meningkat
	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	62	100	161.29	63	100	158.73	Tetap
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	35	35	100.00	40	41	102.50	Meningkat
<b>Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)</b>	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)</b>	Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
<b>Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</b>	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP</b>	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau</b>	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD</b>	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	NA	NA	NA	100	100	142.86	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)</b>	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	NA	NA	NA	100	50	50.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP</b>	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	NA	NA	NA	100	75	75.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD</b>	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah</b>	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	NA	NA	NA	100	90	90.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik</b>	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</b>	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP</b>	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Penerapan Core Values ASN Berakhlak</b>	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	4	4	100.00	100	100	100.00	Tetap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana</b>	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan</b>	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD</b>	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</b>	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah</b>	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predkat	70	71.8	102.57	100	72.98	72.98	Menurun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	88.3	88.30	100	64.64	64.64	Menurun
<b>Peningkatan Prestasi Inovasi</b>	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	1	1	100.00	100	100	100.00	Meningkat
<b>Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor</b>	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Meningkatnya Pengamanan Aset</b>	Pengamanan Aset Tanah	Persen	NA	NA	NA	75	59.00	78.67	Meningkat
<b>Meningkatnya Tata Kelola Aset</b>	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	NA	NA	NA	1	0	0.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Menurunnya Prevalensi Stunting</b>	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	16.5	28.1		14	14	100.00	Meningkat
<b>Pengarusutamaan Gender</b>	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Pengendalian Inflasi</b>	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Kepatuhan Pelaporan P3DN</b>	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	NA	NA	NA	14	14	100.00	Meningkat
<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Nilai LPPD	Nilai	NA	NA	NA	3.6	3.6	100.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
				Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)		
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	NA	NA	NA	73	73	100.00	Meningkat	
<b>Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	NA	NA	NA	64	64	100.00	Meningkat	
<b>Meningkatnya Inovasi Daerah</b>	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	NA	NA	NA	49.59	49.59	100.00	Meningkat	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	NA	NA	NA	8.95	8.95	100.00	Meningkat	
<b>Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik</b>	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	NA	NA	NA	85	85	100.00	Meningkat	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape</b>	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	Tetap
<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</b>	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah</b>	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	NA	NA	NA	100	100	100.00	Meningkat
<b>Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah</b>	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	NA	1	1	100.00	Meningkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
<b>Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah</b>	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	NA	NA	NA	1	1	100.00	Meningkat
<b>TOTAL PERSENTASE KINERJA</b>			623.5	663.2	106.37	3430.14	3366.76	98.15	Menurun

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja kecamatan sebulu dengan kecamatan Kembang Janggut disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kec Sebulu				Kec Kembang Janggut			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Sebulu	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindak Lanjuti	Persen	35	35	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	62	100	161.29	Sangat Tinggi	70	100	143	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	35	35	100.00	Sangat Tinggi	7	112	1606	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kec Sebulu				Kec Kembang Janggut			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Persen	100	98	98.00	Sangat Tinggi	1	1	100	Sangat Tinggi
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kec Sebulu				Kec Kembang Janggut			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);										
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (60 - 70 )	70	100.00	Sangat Tinggi	Baik (60 - 70 )	baik (BO 60.60	100	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00	Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00	Sangat Tinggi	1	0	0	Sangat Rendah
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	90	90.00	Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	95.59	95.59	Sangat Tinggi	100	96.38	96	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kec Sebulu				Kec Kembang Janggut			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100.00	Sangat Tinggi	2	2	100	Sangat Tinggi
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100.00	Sangat Tinggi	1	0	0	Sangat Rendah
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK";	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100.00	Sangat Tinggi	4	1	25	Sangat Rendah
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan;	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.27	67.50	Sedang	0.4	0.13	33	Sangat Rendah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kec Sebulu				Kec Kembang Janggut			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan;	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	28.1	170.30	Sangat Tinggi	16.5	16.36	99	Sangat Tinggi
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu;	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0.14	14.00	Sangat Tinggi	1	0	0	Sangat Tinggi
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	43	95.56	Sangat Tinggi	45	9	20	Sangat Rendah
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	85	85.00	Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) di Perkantoran	Poin	100	90	90.00	Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dokumen LKjIP Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

Adapun Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sebulu dengan kecamatan Kembang Janggut dapat disajikan dalam grafik dibawah ini

Grafik Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 :



### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sebulu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindak Lanjuti	37	100	270.27
Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	63	100	158.73
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	40	41	102.50

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Sebulu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Program	Indikator Kinerja				Anggaran			Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi
		Uraian Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	64.64	80.80	7,552,672,390.00	6,729,402,056.00	89.10	110.27	Efisien
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan sesuai SOP	40	94.8	237.00	21,863,962,000.00	21,109,111,179.00	96.55	40.74	Efisien
		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	89	94.8	106.52				90.64	Efisien
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100	100	100.00	310,000,000.00	303,002,498.00	98.30	98.30	Efisien
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100.00	438,400,000.00	395,565,000.00	89.28	89.28	Efisien
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Kategori Baik	60	100	166.67	226,000,000.00	217,173,000.00	98.54	59.12	Efisien

### 3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 80 nilai dan capaian realisasi kinerja program 64.64 Kategori B (Baik) berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kategori "BAIK" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja. Khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

2) Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja ke – 1 Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024 yaitu Presentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP dengan target sebesar 40 persen realisasi kinerja program 94.8 persen Persentase Realisasi Kinerja Program 237 Persen, target kinerja tercapai diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pihak terkait.

Indikator Kinerja ke -2 Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2024 yaitu Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan dengan target sebesar 89 persen dan capaian realisasi anggaran program 94,8 persen, persentase capaian indikator kinerja 106.52 target kinerja tercapai, diharapkan lebih meningkat koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Tahun 2024 yaitu Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dengan target kinerja sebesar 100 persen dan realisasi kinerja program 100 persen, persentase realisasi kinerja program 100 persen. Target kinerja tercapai, diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 yaitu Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja sebesar 100 persen dan realisasi kinerja program 100 persen. Persentase realisasi kinerja program 100 persen target kinerja tercapai, diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2024 yaitu Persentase Desa yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Kategori Baik dengan target sebesar 60 dan realisasi kinerja program 100, persentase realisasi kinerja program 166.67 persen Target kinerja tercapai, diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pembinaan ke desa – desa dan Pemahaman Tim Asistensi Kecamatan tentang Regulasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa lebih baik lagi.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
<b>Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	80	64.64	80.80	
	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40	94.8	237.00	
	Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan		89	94.8	106.52	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100.00	
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100.00	
	Persentase Desa yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa dalam Kategori Baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60	100	166.67	

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 94.61 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sebulu	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sebulu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	7,552,672,390.00	6,729,402,056.00	89.10	823,270,334.00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143,000,000.00	118,540,380.00	82.90	24,459,620.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	23,662,200.00	94.65	1,337,800.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5,000,000.00	2,522,900.00	50.46	2,477,100.00
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5,000,000.00	4,645,000.00	92.90	355,000.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,816,000.00	96.32	184,000.00
			Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,811,000.00	96.22	189,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,000,000.00	78,083,280.00	79.68	19,916,720.00
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,886,364,689.00</b>	<b>5,209,202,602.00</b>	<b>88.50</b>	<b>677,162,087.00</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,659,231,592.00	4,982,505,505.00	88.04	676,726,087.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85,500,000.00	85,220,000.00	99.67	280,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	9,844,000.00	98.44	156,000.00
			Pelaksanaan Akuntansi SKPD	131,633,097.00	131,633,097.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>33,600,000.00</b>	<b>33,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	-
			Rekonsiliasi an Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00	-
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>107,000,000.00</b>	<b>89,075,729.00</b>	<b>83.25</b>	<b>17,924,271.00</b>
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>107,000,000.00</b>	<b>89,075,729.00</b>	83.25	17,924,271.00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>228,560,000.00</b>	<b>216,436,544.00</b>	<b>94.70</b>	<b>12,123,456.00</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	29,964,000.00	99.88	36,000.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,500,000.00	12,480,000.00	99.84	20,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	4,922,000.00	98.44	78,000.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158,060,000.00	146,120,544.00	92.45	11,939,456.00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000.00	14,950,000.00	99.67	50,000.00
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>113,400,000.00</b>	<b>87.23</b>	<b>16,600,000.00</b>
			Pengadaan Mebel	90,000,000.00	78,700,000.00	87.44	11,300,000.00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	34,700,000.00	86.75	5,300,000.00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>683,451,701.00</b>	<b>633,459,950.00</b>	<b>92.69</b>	<b>49,991,751.00</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	-
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	4,880,000.00	97.60	120,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	483,734,493.00	439,153,182.00	90.78	44,581,311.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192,517,208.00	187,226,768.00	97.25	5,290,440.00
			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>340,696,000.00</b>	<b>315,686,851.00</b>	<b>92.66</b>	<b>25,009,149.00</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170,000,000.00	160,546,846.00	94.44	9,453,154.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,520,000.00	8,350,000.00	98.00	170,000.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162,176,000.00	146,790,005.00	90.51	15,385,995.00
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>21,863,962,000.00</b>	<b>21,109,111,179.00</b>	<b>96.55</b>	<b>754,850,821.00</b>
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>14,880,000.00</b>	<b>99.20</b>	<b>120,000.00</b>
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	14,880,000.00	99.20	120,000.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>21,843,962,000.00</b>	<b>21,089,231,179.00</b>	<b>96.54</b>	<b>754,730,821.00</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	871,602,000.00	846,338,265.00	97.10	25,263,735.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan lain yang Dilimpahkan	20,972,360,000.00	20,242,892,914.00	96.52	729,467,086.00
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>303,002,498.00</b>	<b>99.20</b>	<b>6,997,502.00</b>
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	<b>310,000,000.00</b>	<b>303,002,498.00</b>	<b>97.74</b>	<b>6,997,502.00</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Peningkatan Efektifitas Keegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300,000,000.00	293,002,498.00	97.67	6,997,502.00
		<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>438,400,000.00</b>	<b>395,565,000.00</b>	<b>90.23</b>	<b>42,835,000.00</b>
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	438,400,000.00	395,565,000.00	90.23	42,835,000.00
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	413,400,000.00	372,419,000.00	90.09	40,981,000.00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25,000,000.00	23,146,000.00	92.58	1,854,000.00
		<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>226,000,000.00</b>	<b>217,173,000.00</b>	<b>96.09</b>	<b>8,827,000.00</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226,000,000.00	217,173,000.00	96.09	8,827,000.00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25,000,000.00	18,370,000.00	73.48	6,630,000.00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	201,000,000.00	198,803,000.00	98.91	2,197,000.00
			<b>JUMLAH</b>	<b>30,391,034,390.00</b>	<b>28,754,253,733.00</b>	<b>94.61</b>	<b>1,636,780,657.00</b>

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 95.59 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel Berikut ini (Tabel 3.7) :

**Tabel 3. 7**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun Sebelumnya (2023)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sebulu	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sebulu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	9,136,609,463.00	8,372,910,401.00	91.64	763,699,062.00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,000,000.00	112,689,161.00	88.04	15,310,839.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	19,466,600.00	77.87	5,533,400.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5,000,000.00	4,136,200.00	82.72	863,800.00
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5,000,000.00	4,305,900.00	86.12	694,100.00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,441,000.00	88.82	559,000.00
			Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,975,000.00	99.50	25,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83,000,000.00	75,364,461.00	90.80	7,635,539.00
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,630,867,171.00</b>	<b>4,282,042,766.00</b>	92.47	<b>348,824,405.00</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,530,647,171.00	4,186,389,566.00	92.40	344,257,605.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,000,000.00	3,571,500.00	71.43	1,428,500.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85,220,000.00	83,200,000.00	97.63	2,020,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	8,881,700.00	88.82	1,118,300.00
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>33,600,000.00</b>	<b>33,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	-
			Rekonsiliasi an Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398,690,000.00	320,725,390.00	80.44	77,964,610.00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atrbit Kelengkapannya	366,690,000.00	298,280,000.00	81.34	68,410,000.00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	22,445,390.00	89.78	2,554,610.00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>273,076,000.00</b>	<b>253,051,712.00</b>	<b>92.67</b>	<b>20,024,288.00</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000.00	49,980,000.00	99.96	20,000.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,500,000.00	22,462,000.00	99.83	38,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,576,000.00	10,569,937.00	99.94	6,063.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	130,165,775.00	86.78	19,834,225.00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000.00	14,874,000.00	99.16	126,000.00
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,701,718,880.00</b>	<b>1,438,549,988.00</b>	<b>84.54</b>	<b>263,168,892.00</b>
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,304,760,000.00	1,068,949,988.00	81.93	235,810,012.00
			Pengadaan Mebel	133,720,000.00	126,750,000.00	94.79	6,970,000.00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263,238,880.00	242,850,000.00	92.25	20,388,880.00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>692,811,412.00</b>	<b>677,209,779.00</b>	<b>97.75</b>	<b>15,601,633.00</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503,094,204.00	487,712,676.00	96.94	15,381,528.00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	4,980,000.00	99.60	20,000.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182,517,208.00	182,317,103.00	99.89	200,105.00
			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>1,277,846,000.00</b>	<b>1,255,041,605.00</b>	<b>98.22</b>	<b>22,804,395.00</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170,000,000.00	161,876,300.00	95.22	8,123,700.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,520,000.00	8,460,000.00	99.30	60,000.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,099,326,000.00	1,084,705,305.00	98.67	14,620,695.00
<b>2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>41,442,495,786.00</b>	<b>40,059,239,943.00</b>	<b>96.66</b>	<b>1,383,255,843.00</b>
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>14,850,000.00</b>	<b>99.00</b>	<b>150,000.00</b>
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	14,850,000.00	99.00	150,000.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15,000,000.00	10,889,099.00	72.59	4,110,901.00
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15,000,000.00	10,889,099.00	72.59	4,110,901.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>41,412,495,786.00</b>	<b>40,033,500,844.00</b>	<b>96.67</b>	<b>1,378,994,942.00</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	1,455,311,950.00	755,861,500.00	51.94	699,450,450.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan lain yang Dilimpahkan	39,957,183,836.00	39,277,639,344.00	98.30	679,544,492.00
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>220,032,000.00</b>	<b>198,342,000.00</b>	<b>99.00</b>	<b>21,690,000.00</b>
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan</b>	<b>220,032,000.00</b>	<b>198,342,000.00</b>	<b>90.14</b>	<b>21,690,000.00</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18,000,000.00	17,963,000.00	99.79	37,000.00
			Peningkatan Efektifitas Keagiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	202,032,000.00	180,379,000.00	89.28	21,653,000.00
<b>4</b>		<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>340,780,000.00</b>	<b>302,427,875.00</b>	<b>88.75</b>	<b>38,352,125.00</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	340,780,000.00	302,427,875.00	88.75	38,352,125.00
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	335,780,000.00	297,500,875.00	88.60	38,279,125.00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	4,927,000.00	98.54	73,000.00
<b>5</b>		<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>651,000,000.00</b>	<b>576,569,319.00</b>	<b>88.57</b>	<b>74,430,681.00</b>
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	651,000,000.00	576,569,319.00	88.57	74,430,681.00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	300,000,000.00	258,204,819.00	86.07	41,795,181.00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	351,000,000.00	318,364,500.00	90.70	32,635,500.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>51,790,917,249.00</b>	<b>49,509,489,538.00</b>	<b>95.59</b>	<b>2,281,427,711.00</b>

Dengan demikian pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 30.390.034.390,00 dan pada Tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar 51.790.917.249,00 terjadi pengurangan Anggaran di bandingkan tahun 2023 sebesar Rp 21.399.882.859,00

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2024 rata-rata sebesar 98,82% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Sasaran sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program sebesar 94.23%. (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Kegiatan sebesar 92.98%. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian Kinerja Sub Kegiatan 93.47% (Sangat Tinggi)

Capaian kinerja tahun 2024 98,15% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Kecamatan Sebulu sebesar 106.37% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 8.22%

### 4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya Kerangka Acuan Kerja yang terarah dan terukur pada setiap bidang
- 2) Perlunya komunikasi dan Koordinasi untuk pencapaian Tujuan Organisasi
- 3) Perlunya Pemahaman dan Pelaksanaan yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan atas Kinerja oleh masing-masing bidang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Tupoksi .
- 4) Perlunya Pembinaan, Arahan untuk memperkuat kinerja Organisasi, khususnya Kecamatan Sebulu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sebulu, 13 Februari 2025

Camat Sebulu





# LAMPIRAN - LAMPIRAN,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN SEBULU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY FAHRUDDIN, SE, MM**

Jabatan : **CAMAT SEBULU**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan Sanksi

Pihak pertama dalam hal ini menyatakan bersedia mundur dan /atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

Pihak Pertama,  
CAMAT



**EDY FAHRUDDIN, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197611012001121004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN SEBULU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	37
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	63
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	40
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 31 Maret setiap tahun	Persen	100
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100

5	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100

10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
14	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100

17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14

27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	14
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100

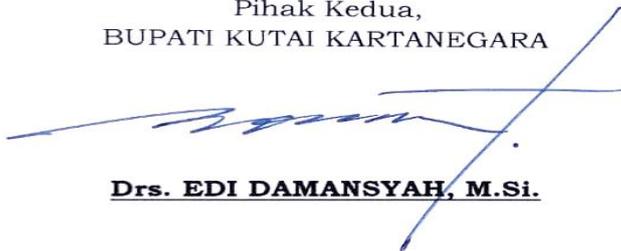
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
40	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
41	Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat UPZ Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024  
KECAMATAN SEBULU  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7,552,672,390.00	APBD P
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20,863,962,000.00	APBD P
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	310,000,000.00	APBD P
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	438,400,000.00	APBD P
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226,000,000.00	APBD P
	Jumlah	30,391,034,390.00	

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**

Pihak Pertama,  
CAMAT



**EDY FAHRUDDIN, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197611012001121004

## GAMBARAN UMUM

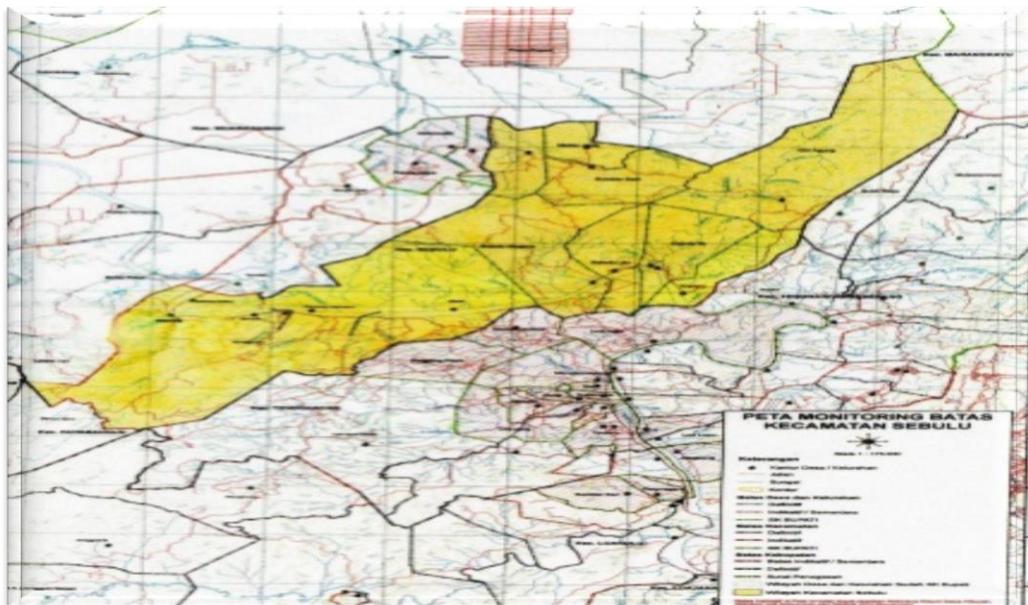
### KONDISI GEOGRAFIS

Secara luas wilayah, Kecamatan Sebulu memiliki wilayah seluas 859.50 km<sup>2</sup> atau 3.15 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2010 wilayahnya terdiri dari atas tiga belas(13) desa yaitu : Selerong, Tanjung Harapan, Beloro, desa Sebulu Ulu, Manunggal Daya, Sumber Sari, Sebulu Iilir, Segihan, Giri agung, Senoni, Sebulu Modern, Lekaq Kidau dan Sanggulan. Pada tahun 2011 jumlah desa di Kecamatan Sebulu bertambah menjadi 14 desa, karena desa Sumber Sari mengalami pemecahan menjadi desa Sumber Sari dan desa Mekar Jaya.

Letak kantor Camat Sebulu berada di desa Sebulu Iilir. Desa yang paling jauh dari kantor Camat adalah desa Lekaq Kidau (berjarak 42 Km) dan jalan yang dilalui berupa sungai dan jalan darat.

### PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SEBULU



#### 1. Hari Jadi Kecamatan Sebulu

**KECAMATAN SEBULU BERDIRI PADA  
HARI JUM'AT, 12 MEI 1965**

## 2. Titik Koordinat Kecamatan Sebulu

### KONDISI GEOGRAFI KECAMATAN SEBULU

Wilayah Kecamatan Sebulu terletak di daerah Katulistiwa berada pada posisi  $116^{\circ} - 39'$  BT dan  $0^{\circ}3' - 0^{\circ}33'$  LS , dengan luas wilayah  $859.50 \text{ Km}^2$

#### 1. Batas – Batas Wilayah Kecamatan Sebulu

Secara Administrasi Kecamatan Sebulu berbatasan dengan :

SEBELAH UTARA	:	KECAMATAN MARANG KAYU
SEBELAH TIMUR	:	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
SEBELAH SELATAN	:	KECAMATAN KOTA BANGUN
SEBELAH BARAT	:	KECAMATAN MUARA KAMAN

#### a. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sebulu

##### **KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN SEBULU**

Rata – Rata Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebulu Sekitar 46 Jiwa  $\text{Km}^2$  atau 14 Rumah Tangga  $\text{Km}^2$ .

#### b. Topografi dan Curah Hujan Kecamatan Sebulu

Derajat Kelerengan / Kemiringan 5 – 30 %  
Curah Hujan Rata – rata 1.949 mm / Tahun

Jumlah Hari Hujan Rata – Rata 132 Hari / Tahun ( 10 Hari / Bulan )

## c. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Kecamatan Sebulu

No.	Nama Desa	JUMLAH PENDUDUDK AKHIR BULAN				Jumlah Dusun	Luas Wilayah (Ha)
		L	P	Jumlah Jiwa	Jumlah KK		
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Selerong	902	796	1.698	491	2	5.343,68
2	Tanjung harapan	758	658	1.416	411	2	607,13
3	Beloro	1.413	1.240	2.653	797	1	8.170,00
4	Sebulu Ulu	2.328	2.215	4.543	1.369		2.858,00
5	Sebulu Ilir	1.472	1.344	2.816	922		3.216,00
6	Segihan	1.365	1.168	2.533	794	3	15.835,00
7	Sumber Sari	3.053	2.859	5.912	1.705	4	3.383,00
8	Manunggal Daya	2.595	2.396	4.991	1.492	5	2.063,00
9	Giri Agung	1.381	1.221	2.602	796	2	11.835,00
10	Senoni	1.014	883	1.897	571	3	2.525,00
11	Sebulu Modern	2.129	2.062	4.191	1.193	2	626.675,00
12	Sanggulan	1.404	1.266	2.670	803	2	8.380,00
13	Lekaq Kidau	246	213	459	137	-	186,38
14	Mekar Jaya	1.201	1.099	2.300	760	2	1.446,00
Jumlah		21.261	19.420	40.681	12.241	28	692.336,81

## d. JARAK DARI DESA KE KECAMATAN, KABUPATEN, PROPINSI (ORBITASI)

NO	NAMA DESA	KECA MATA N ( Km )	KABUPATEN ( Km )	PROVIN SI ( Km )	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SELERONG	25	45	65	JALUR DARAT DAN SUNGAI
2.	TANJUNG HARAPAN	15	20	45	JALUR DARAT DAN SUNGAI
3.	BELORO	11	13	38	JALUR DARAT DAN SUNGAI
4.	SEBULU ULU	2	15	56	JALUR DARAT DAN SUNGAI
5.	SEBULU ILIR	1	11	41	JALUR DARAT DAN SUNGAI
6.	SEGIHAN	2	14	38	JALUR DARAT DAN SUNGAI

NO	NAMA DESA	KECA MATA N ( Km )	KABUPATEN ( Km )	PROVIN SI ( Km )	KETERANGAN
7.	SUMBER SARI	13	40	70	JALUR DARAT
8.	MANUNGGAL DAYA	15	41	72	JALUR DARAT
9.	GIRI AGUNG	10	25	40	JALUR DARAT
10.	SENONI	21	31	53	JALUR DARAT DAN SUNGAI
11.	SEBULU MODERN	4	9	51	JALUR DARAT DAN SUNGAI
12.	SANGGULAN	20	30	52	JALUR DARAT DAN SUNGAI
13.	LEKAQ KIDAU	27	48	69	JALUR DARAT DAN SUNGAI
14.	MEKAR JAYA	14	40	71	JALUR DARAT

#### **Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sebulu**

Kemajuan teknologi membawa konsekwensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala momentum. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di kantor Camat Sebulu kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

TABEL SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN SEBULU

NO	RUANGAN /GEDUNG/RUMAH DINAS	KEADAAN	JUMLAH (UNIT)
1	2	3	4
1.	Ruang / Gedung Camat	BAIK	1
2.	Ruang Sekretaris Kecamatan	BAIK	1
3.	Ruang Kasi Pemerintahan	BAIK	1
4.	Ruang Kasi KESRA	BAIK	1
5.	Ruang Kasi TRANTIB	BAIK	1
6.	Ruang Kasi PMD	BAIK	1
7.	Ruang Kasi Pelayanan Umum	BAIK	1
8.	Ruang Kasi Umum dan Kepegawaian	BAIK	1
9.	Ruang Kasubag Program & Keuangan	BAIK	1
10.	Ruang Bendahara	BAIK	1
11.	Ruang Perpustakaan	BAIK	1
12.	Ruang Dapur	BAIK	1
13.	Toilet	BAIK	2
14.	Gedung Pertemuan	BAIK	1
15.	Gedung Sekretariat PKK	BAIK	1
16.	Toilet Luar	RUSAK RINGAN	3
17.	Musholla	RUSAK RINGAN	1
18.	Gedung Arsip	RUSAK RINGAN	1
19.	BPU	RUSAK RINGAN	1
20.	BPU	RUSAK BERAT	1
21.	Rumah Dinas Camat	RUSAK RINGAN	1
22.	Rumah Dinas Staf	RUSAK RINGAN	5
23.	Rumah Dinas Staf	RUSAK BERAT	3
24.	Gedung PATEN	RUSAK RINGAN	1

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
<b>KIB A TANAH</b>			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	Buah
2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Buah
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2	Buah
4	Tanah Untuk Makam Muslim	1	Buah
<b>KIB B PERALATAN DAN MESIN</b>			
1	Dump Truck	1	Unit
2	Nozel Kuningan Pernekel	2	Unit
3	P.C Unit	31	Unit
4	Lap Top	15	Unit
5	Note Book	12	Unit
6	Hard Disk	9	Unit
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	Unit
8	Baju Anti Panas	3	Unit
9	Selang Power Inflator Tekanan Rendah	5	Unit
10	Selang Tekanan Tinggi	2	Unit
11	Station Wagon	4	Unit
12	Sepeda Motor	13	Unit
13	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	Unit
14	Lemari Penyimpan	1	Unit
15	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inchi)	1	Unit
16	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Unit
17	Lemari Besi/Metal	11	Unit
18	Lemari Kayu	2	Unit
19	Rak Besi	10	Unit
20	Filing Cabinet Besi	12	Unit
21	Brandkas	2	Unit
22	Lemari Kaca	5	Unit
23	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit
24	Alat Penghancur Kertas	3	Unit
25	Papan Nama Instansi	1	Unit
26	Alat Kantor Lainnya	4	Unit
27	Meja Kerja Kayu	3	Unit
28	Meja Rapat	5	Unit
29	Tempat Tidur Kayu	2	Unit
30	Meja Makan Besi	1	Unit
31	Kursi Tamu	3	Unit
32	Bangku Tunggu	5	Unit
33	Meja Komputer	1	Unit
34	Sofa	4	Unit

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
35	Meubeleur lainnya	6	Unit
36	Alat Pembersih lainnya	10	Unit
37	Lemari Es	4	Unit
38	A.C. Window	9	Unit
39	A.C. Split	12	Unit
40	Kipas Angin	10	Unit
41	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit
42	Televisi	2	Unit
43	Loudspeaker	2	Unit
44	Sound System	3	Unit
45	Wireless	1	Unit
46	Camera film	1	Unit
47	Dispenser	13	Unit
48	Handy Cam	1	Unit
49	Karpet	5	Unit
50	Alat Pemadam/Portable	18	Unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	7	Unit
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
53	Meja Kerja Pejabat lain-lain	31	Unit
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	Unit
56	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Unit
57	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I	6	Unit
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Unit
59	Audio Monitor Active	1	Unit
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Unit
61	Camera Electronic	1	Unit
62	Digital Video Effect	1	Unit
63	Film Projector	1	Unit
64	Camera View Finder	2	Unit
65	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Unit
66	Unit Tranceiver HF Portable	7	Unit
67	Unit Tranceiver HF Transportable	2	Unit
68	Engine Running In Tester	1	Unit
69	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	Unit
70	Nozzlemeter Flowmeter	2	Unit
71	Serial Scanner/Printer	2	Unit
72	LCD Projector/Infocus	2	Unit
<b>KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	
3	Bangunan Gedung Kantor Semi		

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
	Permanen	1	
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	
7	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	
8	Bangunan Posyandu	1	
9	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	
10	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	1	
11	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	
13	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	
14	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Buah
15	Bangunan Tempat Parkir	1	Buah
16	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Buah
17	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	Buah
18	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
19	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
20	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
21	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
22	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
23	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
24	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah
25	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Buah

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
26	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Buah
<b>KIB D JARINGAN DAN IRIGASI</b>			
1	Bangunan Got Miring	1	Buah
2	Jalan Desa	23	Buah
3	Jalan Desa Lain-lain	8	Buah
4	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	2	Buah
5	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	Buah
6	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Buah
7	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	3	Buah
8	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Buah

Sumber data : Bagian Aset Kecamatan Sebulu Januari 2024

**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN (PATEN) KECAMATAN SEBULU TAHUN 2024**

No	Jenis pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah	Keterangan
1	Pembuatan P	19	92	97	120	104		146	94	79		9	84	844	Kasi Pemerintahan
2	Pembuatan KK	16	44	60	35	41	42	58	58	44	19	9	30	456	Kasi Pemerintahan
4	Mengambil Surat Pindah	7	10	8	5	12	11	18	10	4	5	6	3	99	Kasi Pemerintahan
6	Surat Keterangan Ahli Waris	16	5	11	11	8	6	9	9	10	11	8	7	111	Kasi Pemerintahan
9	Pembuatan AK I	11	7	9	15	26	15	25	21	19	12	29	11	200	Kasi Kesra
10	Surat Dispensai Nikah	8	5	1	8	7	7	6	6	6	8	6	8	76	Kasi Kesra
11	Surat Ket. Tidak Mampu	8	7	723	22	153	10	16	70	311	21	22	22	1385	Kasi Kesra
16	Rekomendasi NIB	2	1	3	1	2				2	4	3	2	20	Kasi Pelum
17	Pembuatan SKCK	39	19	26	51	79	42	52		73	61	50	26	518	Kasi Trantib
20	Rekomendasi Pertanian		1	10	8	5			4		1	3	9	41	Kasi PMD
22	Rekomendasi Perikanan	3	4	2	6					5	1	3	2	26	Kasi PMD
27	Rekomendasi Permohonan Bantuan Sarana Prasarana		2	1	14	15		1	4	1	1	4	1	44	Kasi PMD
	Jumlah	129	197	951	452	452	133	331	276	554	144	152	205	3,820	